

Nama: Dwi Apriyana

NPM: 2313031022

## **Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya**

### **1. Analisis Struktur Pengeluaran**

- Apakah Struktur Belanja Pendidikan Sudah Efisien?

Struktur Belanja anggaran pendidikan di Provinsi Nusantara Raya sudah mencapai 22% dari APBD, penggunaan anggaran tersebut belum efisien. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa dibandingkan rata-rata nasional, serta tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya alokasi belanja untuk gaji dan tunjangan guru yang mencapai 68%, besarnya alokasi tersebut tidak menjadi masalah apabila distribusi guru berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kelebihan guru di wilayah perkotaan dan kekurangan guru di daerah terpencil, akibatnya anggaran yang besar belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh peserta didik. Selain itu, alokasi untuk infrastruktur yang hanya sebesar 12% masih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan saat ini.

- Bagian yang Perlu Direalokasi

Bagian anggaran yang perlu direalokasi adalah anggaran administrasi dan pengeluaran lainnya yang saat ini mencapai 12%. Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran bantuan siswa yang hanya 8%. Sebagian dana administrasi bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti penyediaan internet di sekolah, pengadaan komputer, dan fasilitas pembelajaran digital lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah anggaran untuk pelatihan guru, hal ini penting karena rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa tidak hanya disebabkan oleh kurangnya fasilitas, tetapi juga karena kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Anggaran bantuan siswa juga sebaiknya ditambah agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan begitu, kesenjangan pendidikan antara sekolah di kota dan di desa dapat dikurangi, jadi realokasi anggaran difokuskan pada infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan bantuan siswa karena ketiga hal tersebut lebih berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi Provinsi Nusantara Raya.

## 2. Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah Pembiayaan Masih Terlalu Bergantung pada Pemerintah Daerah?

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih bergantung pada pemerintah daerah, hal ini terlihat dari seluruh program pendidikan yang dibiayai melalui anggaran daerah, dan tiak adanya sumber pendanaan lain yang dapat membantu mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ketergantungan ini menjadi masalah karena kebutuhan pendidikan terus meningkat, terutama untuk pemerataan guru, pembangunan infrastruktur digital, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Jika pendapatan daerah menurun, program-program pendidikan yang sudah direncanakan berisiko tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, kondisi pendidikan di Nusantara Raya menunjukkan bahwa anggaran yang ada saat ini belum mampu mengatasi berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi dan numerasi siswa, ketimpangan kualitas sekolah, serta keterbatasan fasilitas digital.

- Perlukah Melibatkan Sektor Swasta atau Skema Pembiayaan Alternatif?

Melibatkan sektor swasta diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Nusantara Raya, hal ini karena masih banyak kebutuhan pendidikan yang memerlukan biaya besar, seperti pembangunan fasilitas digital, penyediaan internet di sekolah, pelatihan guru, dan bantuan bagi siswa kurang mampu. Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta adalah model paling cocok digunakan, misalnya, perusahaan dapat membantu menyediakan komputer, akses internet, atau fasilitas belajar melalui program CSR yang dimiliki. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau dunia usaha untuk mendukung pelatihan guru dan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, dengan kerja sama seperti ini dapat membantu sumber pendanaan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan dari sektor swasta, pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan tambahan sehingga berbagai program pendidikan dapat berjalan lebih maksimal dan merata di seluruh wilayah.

## 3. Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen Apa yang Realistis Diadopsi?

Elemen dari praktik negara OECD yang paling realistis untuk diadopsi di Provinsi Nusantara Raya adalah penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), pendanaan berdasarkan kebutuhan siswa, serta peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan. Ketiga elemen ini dipilih karena sesuai

dengan permasalahan yang sedang dihadapi Nusantara Raya, yaitu rendahnya hasil belajar siswa, tingginya kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, serta distribusi guru yang belum merata. Penganggaran berbasis kinerja dapat membantu pemerintah memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara lebih efektif dan memberikan hasil yang jelas. Sementara itu, pendanaan berdasarkan kebutuhan siswa dapat membantu sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil memperoleh dukungan yang lebih besar dibandingkan sekolah yang fasilitasnya sudah memadai. Selain itu, peningkatan kualitas guru juga penting karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru yang mengajar di kelas.

- Tantangan Implementasinya di Indonesia

Tantangan terbesar dalam menerapkan praktik tersebut di Indonesia adalah masih adanya perbedaan kondisi antar daerah, ini karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama terutama dalam hal akses internet dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem penganggaran maupun evaluasi berbasis data. Selain itu, kualitas data pendidikan yang tersedia juga belum sepenuhnya akurat dan merata. Padahal, penganggaran berbasis kinerja dan pendanaan berdasarkan kebutuhan siswa membutuhkan data yang lengkap agar dapat diterapkan dengan baik. Tantangan lainnya adalah kesiapan pemerintah daerah, sekolah, dan tenaga pendidik dalam menyesuaikan diri dengan sistem yang baru.

#### **4. Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan Selama 5 Tahun**

##### **I Latar Belakang**

Berdasarkan kondisi yang ada, masalah utama Nusantara Raya bukan terletak pada kurangnya anggaran pendidikan, tetapi pada pembagian anggarannya yang belum tepat. Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusantara Raya telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, besarnya anggaran yang dialokasikan belum dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang sesuai harapan. Berdasarkan hasil evaluasi, kemampuan literasi dan numerasi siswa masih berada di bawah rata-rata nasional, selain itu kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Sekolah di kota memiliki fasilitas yang lebih baik, jumlah guru yang lebih memadai, serta akses

teknologi yang lebih lengkap. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan sarana dan tenaga pendidik.

Distribusi guru yang belum merata menjadi salah satu permasalahan, banyak guru berfokus di wilayah perkotaan, sementara beberapa sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar. Kondisi ini menyebabkan kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi tidak sama. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menuntut sekolah untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, keterbatasan akses internet dan fasilitas digital masih menjadi hambatan bagi banyak sekolah di Nusantara Raya. Dari berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformasi pembiayaan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya.

## II. Tujuan Reformasi

Reformasi pembiayaan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas pembelajaran. Selain itu, reformasi juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan melalui pemerataan guru, peningkatan sarana pendidikan, serta perluasan akses teknologi.

## III Program Reformasi Pembiayaan Pendidikan

### A. Perubahan Struktur Belanja

Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya saat ini struktur belanja masih belum optimal karena sebagian besar anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Sementara itu, anggaran untuk bantuan siswa dan pengembangan fasilitas sekolah masih relatif kecil. Padahal, salah satu masalah yang dihadapi Nusantara Raya adalah tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di kota dan desa serta masih terbatasnya fasilitas digital di banyak sekolah. Akibatnya, meskipun anggaran pendidikan cukup besar, perbaikan kualitas pendidikan belum terlihat secara signifikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur belanja dengan tetap mempertahankan hak guru, tetapi mengurangi pengeluaran administrasi yang kurang efektif. Dana yang dihemat dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap siswa dan sekolah.

<b>Pos Anggaran</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Target Reformasi</b>
Gaji dan Tunjangan Guru	68%	60%
Infrastruktur dan Digitalisasi	12%	20%
Bantuan Siswa	8%	12%
Administrasi dan Lainnya	12%	8%

Peningkatan anggaran infrastruktur difokuskan untuk pembangunan fasilitas belajar, penyediaan internet, serta pengadaan perangkat digital di sekolah. Sementara itu, tambahan anggaran bantuan siswa digunakan untuk memperluas program beasiswa, bantuan transportasi, bantuan perlengkapan sekolah, dan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Melalui perubahan struktur belanja ini, anggaran pendidikan tidak hanya habis untuk kebutuhan rutin, tetapi juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan secara langsung.

## B. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

### 1. Pemerataan Distribusi Guru

Salah satu masalah yang masih dihadapi Provinsi Nusantara Raya adalah tidak meratanya distribusi guru. Banyak sekolah di wilayah perkotaan memiliki jumlah guru yang cukup bahkan berlebih, sementara beberapa sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini menyebabkan kualitas pembelajaran yang diterima siswa menjadi berbeda-beda, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan pendataan ulang jumlah guru di setiap sekolah. Setelah data diperoleh, pemerintah dapat melakukan redistribusi guru secara bertahap ke daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Kebijakan ini perlu didukung dengan pemberian insentif agar guru lebih termotivasi untuk bertugas di daerah terpencil.

### 2. Pelatihan Guru Secara Berkelanjutan

Peningkatan kompetensi juga perlu dilakukan secara terus-menerus dengan cara memberikan pelatihan kepada guru. Pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi lebih diarahkan pada kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Materi pelatihan berupa penguatan literasi dan numerasi, strategi pembelajaran aktif, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan media belajar yang kreatif. Pelatihan dilakukan secara berkala sehingga guru dapat terus memperbarui kemampuan mereka sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.

### 3. Evaluasi Kinerja Guru

Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat perkembangan kompetensi guru sekaligus memastikan bahwa program pelatihan memberikan hasil yang nyata. Penilaian tidak hanya berdasarkan kehadiran atau administrasi, tetapi juga memperhatikan keterlibatan guru dalam pengembangan diri, inovasi pembelajaran, dan perkembangan hasil belajar siswa. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan, promosi, maupun program pembinaan lanjutan bagi guru yang masih memerlukan pendampingan.

### C. Digitalisasi Sekolah

Program digitalisasi dimulai dengan pemetaan kondisi infrastruktur teknologi di seluruh sekolah. Sekolah yang belum memiliki akses internet dan perangkat pembelajaran digital menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program.

Pada tahun kedua dan ketiga, pemerintah mulai memperluas jaringan internet serta menyediakan perangkat teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dan sektor swasta dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut.

Pada tahun keempat dan kelima, fokus tidak lagi hanya pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa didorong untuk menggunakan platform pembelajaran digital sehingga teknologi benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

### D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Pemerintah harus membangun sistem informasi pendidikan yang mampu mengintegrasikan data siswa, guru, sekolah, dan penggunaan anggaran dalam satu platform yang mudah diakses. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester dan setiap tahun. Indikator yang digunakan meliputi peningkatan skor literasi dan numerasi siswa, pemerataan distribusi guru, peningkatan jumlah sekolah yang terhubung internet, serta penurunan kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Hasil evaluasi tersebut harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program reformasi yang sedang dijalankan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan dapat terus terjaga.